



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 9, No. 1 Tahun 2026

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v9i1.35452>

Reintegrasi Aktor dan Jaringan Jamaah Islamiyah di Kota Palu

Noorwahid Sofjan

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia
noorwahidsofjan@uindatokarama.ac.id

Asriyana S Kaseng

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia
asriyana@uindatokarama.ac.id

Submitted: December 17th 2025

Revised: June 26th 2026

Accepted: August 3rd 2026

Abstract

This article examines the reintegration process of former members and networks of Jama'ah Islamiyah (JI) in Palu City by employing a qualitative case study design combined with the analytical framework of Actor–Network Theory (ANT). The study aims to explore how ideological transformation, social interactions, and structural support shape the reintegration of former JI members following the organization's dissolution in 2024. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were analyzed using thematic analysis complemented by actor-network mapping. The findings reveal three key dimensions of the reintegration process. First, a collective ideological transformation has occurred, characterized by the explicit rejection of violence and the adoption of more moderate religious practices. Second, social interactions between former JI members and local communities have increased through communal activities, shared facilities, and inclusive religious engagements, fostering greater social acceptance and trust. Third, state policies and material infrastructures function as important mediators in stabilizing social networks, particularly through monitoring mechanisms, economic empowerment programs, and the provision of interactional spaces such as temporary housing and mosques. In sum, the study demonstrates that successful reintegration is not solely dependent on individual ideological change but also on the interplay between human and non-human actors that collectively shape adaptive and sustainable social networks. These findings contribute to the broader understanding of post-extremist reintegration by highlighting the relational and networked dimensions of social transformation.

Keywords: Actor–Network Theory, Deradicalization, Jama'ah Islamiyah, Reintegration

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses reintegrasi aktor dan jaringan Jama'ah Islamiyah (JI) di Kota Palu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, serta

dipadukan dengan kerangka analitis *Actor–Network Theory* (ANT). Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana transformasi ideologis, dinamika interaksi sosial, dan dukungan struktural membentuk proses reintegrasi mantan anggota JI setelah pembubaran organisasi pada tahun 2024. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen, dan dianalisis melalui teknik tematik yang dikombinasikan dengan pemetaan jaringan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reintegrasi berlangsung melalui tiga temuan utama. *Pertama*, terdapat perubahan ideologis kolektif yang ditandai dengan penolakan eksplisit terhadap kekerasan serta penyesuaian praktik keagamaan yang lebih moderat. *Kedua*, interaksi sosial antara eks-JI dan masyarakat meningkat melalui kegiatan komunal, fasilitas bersama, dan aktivitas keagamaan yang inklusif. *Ketiga*, kebijakan negara dan infrastruktur material berperan sebagai mediator penting yang menstabilkan jaringan sosial, terutama melalui monitoring, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan ruang interaksi seperti hunian sementara dan masjid. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi membutuhkan sinergi antara aktor manusia dan non-manusia dalam membentuk jaringan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Actor–Network Theory*, Deradikalisasi, Jama'ah Islamiyah, Reintegrasi.

Pendahuluan

Reintegrasi aktor dan jaringan Jama'ah Islamiyah (JI) di Kota Palu merupakan isu strategis yang memerlukan analisis akademik mendalam karena wilayah ini menjadi salah satu simpul operasi JI selama lebih dari dua dekade. Peran historis Palu dan Poso sebagai lanskap konflik yang membentuk pola mobilitas anggota JI sejak akhir 1990-an, sekaligus lokasi sejumlah operasi penegakan hukum terhadap jaringan tersebut menunjukkan urgensi yang kuat. Ditambah fakta yang memperkuat posisi Palu sebagai ruang penting studi reintegrasi: pertama, JI menduduki posisi signifikan dalam dinamika keamanan Sulawesi Tengah hingga pembubaran resminya pada Juli 2024; kedua, rentetan penangkapan anggota JI antara 2021–2024 menunjukkan masih aktifnya sisa jaringan; Dan ketiga, keberadaan konsentrasi anggota dan aset sosial seperti Masjid Husnayain di Kelurahan Silae menjadikan Palu sebagai pusat aktivitas jaringan. Kondisi ini menjadikan kajian reintegrasi di Palu relevan untuk memahami transformasi ideologis dan sosial pasca-delegitimasi struktural JI.

Selain itu, reintegrasi eks anggota JI tidak berlangsung sebagai proses individual semata, melainkan melalui interaksi jaringan sosial, keagamaan, dan material yang khas. Di Kota Palu, ada pola adaptasi yang konstruktif dan relatif stabil dibandingkan wilayah lain. Ini ditandai dengan: pertama, kebangkitan kembali aktivitas publik pascapandemi—seperti pengajian, majelis ilmu, dan kegiatan Jumat Berkah—menjadi arena negosiasi nilai moderasi; kedua, infrastruktur

material seperti jaringan pipa air swadaya masyarakat dan sumur bor panel surya yang dikelola bersama warga sekitar berfungsi sebagai penghubung interaksi antar-komunitas; ketiga, keterlibatan BNPT, Densus 88, pemerintah daerah, BUMN, dan tokoh agama menciptakan konfigurasi dukungan sosial yang memperkuat reintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat menjelaskan bagaimana praktik reintegrasi berjalan melalui kerangka hubungan yang saling mengisi, bukan semata melalui pendekatan punitif negara. Juga berupaya menjelaskan bagaimana proses reintegrasi aktor dan jaringan JI dijalankan di tengah medan sosial yang penuh hambatan dan perubahan.

Reintegrasi membutuhkan rekonstruksi ulang hubungan sosial yang sebelumnya terpolarisasi oleh sejarah konflik, intervensi hukum, dan simbol-simbol ideologis. Hal ini tentu mempertegas kompleksitas dalam masalah ini (Davies & Peña, 2021). Adanya stigma sosial terhadap mantan teroris masih membatasi penerimaan sosial, sekaligus menciptakan jarak simbolik dengan komunitas luas. Begitu juga gangguan kriminalitas dan penutupan fasilitas publik yang penting bagi anggota JI, mengganggu kualitas relasi sosial yang sedang dibangun. Termasuk penangkapan tokoh penting JI pada 2022 sempat melemahkan struktur aktivitas sosial dan religi yang menjadi medium penting reintegrasi. Karena itu, masalah penelitian ini tidak hanya mencakup aspek pemulihan individu, tetapi juga renegotiasi nilai, relasi kekuasaan, identitas, dan jaringan material dalam konteks sosial di Kota Palu.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga mengungkapkan kompleksitas reintegrasi mantan pelaku terorisme yang umumnya tidak terlepas tiga variabel utama yakni: pertama, sebagian penelitian menekankan bahwa transformasi ideologis merupakan inti dari perubahan perilaku ekstremis, di mana modifikasi doktrin diyakini mampu mengurangi legitimasi kekerasan (Horgan, 2009; Neumann, 2013). Kedua, pendekatan yang mengkaji peran lingkungan sosial, khususnya keluarga, tokoh agama, dan komunitas lokal, sebagai penyangga penting yang mempengaruhi stabilitas reintegrasi serta kemampuan individu untuk tidak kembali ke jaringan lama (Cherney, 2020). Dan terakhir studi berbasis struktural yang melihat kondisi ekonomi, akses sumber daya, dan kebijakan negara berkontribusi besar dalam mencegah residivisme, terutama melalui pemberdayaan ekonomi dan regulasi keamanan (Zahari et al., 2024). Ketiga kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa reintegrasi dipahami sebagai fenomena multidimensional, namun

belum banyak studi yang menghubungkan seluruh variabel tersebut dalam satu model analitis terpadu yang memetakan relasi antar-aktor manusia dan non-manusia.

Kecenderungan pertama yang mengadopsi pendekatan ideologis-psikologis memusatkan perhatian pada perubahan keyakinan sebagai syarat utama keberhasilan reintegrasi. Studi-studi ini memposisikan deradikalisasi sebagai proses kognitif yang menggeser orientasi kekerasan menuju moderasi, di mana transformasi doktrin dianggap menghasilkan perubahan perilaku yang lebih stabil (Bartlett & Miller, 2012). Pendekatan tersebut umumnya menggunakan desain kualitatif berbasis wawancara untuk menelusuri dinamika pemikiran individu mantan ekstremis dan memetakan faktor pendorong perubahan. Di Indonesia, pendekatan ini selaras dengan temuan tentang perubahan internal JI yang menandai berakhirnya fungsi *tanzim siri'* dan *tanzim askari* sebagai respons terhadap tekanan struktural negara serta refleksi doktrinal internal. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi motivasi internal aktor. Namun, keterbatasannya muncul ketika perubahan ideologi tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku sosial, terutama ketika faktor material atau jaringan sosial justru lebih dominan memengaruhi tindakan individu.

Kecenderungan kedua mengarahkan fokus pada jaringan sosial dan dukungan komunitas sebagai determinan utama keberhasilan reintegrasi. Penelitian-penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan keluarga, tokoh agama, aparat lokal, dan komunitas merupakan faktor krusial dalam membentuk kembali identitas mantan pelaku terorisme serta mencegah keterisolasian sosial yang sering menjadi pemicu re-radikalisasi (Ariyanti & Maula, 2020; Mujahid, 2020). Temuan serupa terlihat dalam konteks reintegrasi JI di Kota Palu, di mana hubungan sosial antara eks-JI dan masyarakat dibangun melalui kegiatan keagamaan, interaksi ekonomi, dan program-program yang memfasilitasi koneksi informal. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan proses integrasi sosial sebagai hasil negosiasi interpersonal. Namun, studi-studi tersebut sering kali mengabaikan bagaimana objek material—seperti sumber air, infrastruktur masjid, regulasi keamanan, atau aset yayasan—berfungsi sebagai mediator penting yang memfasilitasi atau membatasi hubungan antar-aktor. Dengan demikian, pendekatan relasi sosial masih menyisakan celah dalam memahami bagaimana faktor non-manusia ikut mengonstruksi interaksi sosial.

Pola penelitian ketiga mengadopsi perspektif struktural-material yang menempatkan faktor ekonomi, kebijakan, dan infrastruktur fisik sebagai elemen kunci reintegrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan reintegrasi sering kali terjadi akibat ketidakmerataan akses sumber daya, minimnya dukungan kebijakan, atau stigmatisasi sosial yang diperkuat oleh media dan kebijakan represif (Ike et al., 2022; Mwangi et al., 2022). Studi-studi ini juga mendokumentasikan pentingnya intervensi pemerintah, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan ekonomi, dan pemantauan pasca-pembebasan dalam mengurangi risiko keterlibatan ulang. Dalam konteks Kota Palu, keberadaan sumur bor panel surya, masjid sebagai pusat aktivitas, serta program pemberdayaan ekonomi menjadi contoh konkret bagaimana infrastruktur material membentuk jaringan interaksi antara eks-JI dan masyarakat. Kelebihan pendekatan ini ialah kemampuannya menangkap konteks struktural secara komprehensif. Meski demikian, pola ini cenderung melihat reintegrasi sebagai proses mekanis, mengabaikan dimensi simbolik, ideologis, dan negosiasi sosial yang juga menentukan keberhasilannya.

Meskipun ketiga kecenderungan penelitian tersebut menyumbang pemahaman penting mengenai reintegrasi mantan pelaku terorisme, keseluruhannya belum mampu memetakan interaksi simultan antara aktor manusia dan non-manusia secara komprehensif. Pendekatan ideologis cenderung mengabaikan pengaruh kebijakan, aset material, dan infrastruktur lokal. Pendekatan sosial-komunitas sering kali memusatkan perhatian pada hubungan interpersonal tanpa melihat objek teknis atau kebijakan sebagai aktor aktif dalam jaringan. Sementara itu, pendekatan struktural-material memandang reintegrasi sebagai intervensi teknokratis, kurang menyoroti dinamika makna, proses penegosiasian nilai, serta perubahan identitas yang berlangsung di tingkat mikro. Ketidakmampuan literatur terdahulu dalam mengintegrasikan berbagai dimensi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang menuntut model analitis baru. Kasus JI di Palu memperlihatkan bahwa proses reintegrasi berlangsung melalui relasi kompleks antara masjid, fasilitas air bersih, lembaga pemerintah, jaringan sosial, dan perubahan ideologis yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh model-model sebelumnya.

Karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis proses reintegrasi aktor dan jaringan JI di Kota Palu dengan menggunakan *Actor-Network Theory* (ANT) sebagai kerangka analisis. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa reintegrasi tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui perubahan perilaku mantan anggota, tetapi melalui cara aktor manusia dan non-manusia

membangun kembali jaringan sosial yang stabil. Tiga bukti memperkuat tujuan ini: pertama, karena interaksi intens eks anggota JI dengan aparat negara, warga lokal, dan tokoh agama memperlihatkan adanya proses translasi nilai moderasi; kedua, aktor non-manusia seperti masjid, kebijakan deradikalisasi, hunian sementara, dan infrastruktur air bertindak sebagai medium integratif; ketiga, kegiatan sosial-keagamaan yang rutin menjadi ruang negosiasi yang memungkinkan munculnya kohesi baru. Dengan demikian, tujuan penelitian diarahkan untuk mengungkap model jejaring, dinamika relasi, serta praktik adaptasi sosial yang membentuk keberhasilan reintegrasi di Palu.

Kerangka Teori

Untuk menjawab tujuan penelitian di atas, *Actor–Network Theory* (ANT) dipilih sebagai kerangka konseptual dalam menyorot proses reintegrasi yang melibatkan manusia dan non-manusia dalam satu jaringan yang saling memengaruhi (Crawford, 2020). ANT memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh karena memposisikan infrastruktur, kebijakan, teknologi, regulasi, masjid, serta simbol-simbol keagamaan sebagai aktor yang turut membentuk stabilitas jaringan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memetakan bagaimana translasi nilai, distribusi peran, negosiasi, dan konsolidasi jaringan berlangsung dalam konteks Palu, sekaligus menawarkan model alternatif yang lebih integratif dan sensitif terhadap dinamika sosial-material dalam proses reintegrasi.

Sebagai alat analisis interdisipliner, ANT mengusung pemahaman bahwa realitas sosial dibentuk oleh jaringan heterogen berbagai aktor baik manusia maupun non-manusia yang saling berinteraksi dan bernegosiasi dalam suatu sistem hubungan (Latour, 2005). Keunikan ANT terletak pada konsep aktor yang tidak terbatas pada manusia, melainkan juga mencakup objek, teknologi, ide, kebijakan, hingga institusi, yang saling memengaruhi dan terbentuk dalam jaringan (Law, 1992). Dalam konteks sosial politik seperti reintegrasi mantan teroris, ANT memfokuskan analisis pada bagaimana aktor seperti individu mantan teroris dan jaringan yang mereka bina seperti keluarga, komunitas sosial, aparat negara, lembaga rehabilitasi yang berinteraksi dan membentuk proses sosial yang kompleks (Ryfe, 2022).

ANT menolak gagasan struktur sosial yang deterministik dan menegaskan bahwa jaringan aktor terbangun, bertahan, atau runtuh melalui proses translasi atau adaptasi nilai dan negosiasi

secara terus-menerus (Callon, 1986). Di sini translasi dimaknai sebagai cara aktor melakukan negosiasi, melakukan pengalihan kepentingan, dan penerjemahan dan penyesuaian nilai untuk membentuk jaringan baru yang efektif. Dalam reintegrasi, proses ini merefleksikan bagaimana mantan teroris dan aktor lain mencapai pemahaman bersama dan membentuk jejaring sosial baru yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku (Callon, 1986). Sedangkan jaringan di sini dipandang sebagai kumpulan aktor yang terkait dan saling memengaruhi. Jaringan ini bersifat dinamis dan kontinu serta berkembang berdasarkan interaksi, negosiasi mempertahankan stabilitas atau melakukan perubahan. Dalam konteks reintegrasi, jaringan meliputi jaringan sosial mantan teroris, hubungan keluarga, komunitas lokal, aparat keamanan, lembaga sosial, dan program rehabilitasi yang bersama-sama menentukan keberhasilan reintegrasi (Law, 1992).

Selain itu, ANT juga mengenalkan peran penting aktor sebagai pembangun jaringan (*network builders*) yang bertugas menghubungkan aktor-aktor berbeda, memimpin negosiasi, dan menciptakan kohesi sosial. Dalam reintegrasi mantan teroris, tokoh masyarakat, fasilitator deradikalisasi, serta lembaga sosial memiliki peran ini untuk memfasilitasi penyatuan kembali aktor dalam jaringan sosial masyarakat yang lebih luas (Law, 1992). Pembangun jaringan ini berperan penting sebagai aktor dominan yang merupakan pemegang otoritas dalam kelompok untuk mengarahkan, membina hingga menstabilkan jaringan baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada aktor dan jaringan yang terlibat dalam proses reintegrasi mantan anggota Jama'ah Islamiyah (JI) di Kota Palu. Mencakup individu eks-narapidana terorisme, keluarga mereka, tokoh agama, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta aktor non-manusia berupa kebijakan, fasilitas fisik, dan infrastruktur sosial yang berperan dalam membentuk dinamika reintegrasi (Thahir et al., 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap relasi kompleks antara tindakan individu dan struktur jaringan yang mengitarinya. Selain itu, organisasi dan lembaga yang terlibat, seperti BNPT, Densus 88, aparat kelurahan, RT/RW, BUMN, dan yayasan pendidikan, dipahami sebagai bagian dari jaringan institusional yang memengaruhi perilaku sosial mantan anggota JI. Masjid Husnayain, hunian sementara, serta sumber air bersama juga dianalisis sebagai artefak material yang memiliki fungsi sosial dan simbolik dalam pembentukan hubungan antar kelompok. Dengan demikian, unit analisis

penelitian tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga pada jejaring sosial dan material yang memproduksi kondisi reintegrasi secara menyeluruh.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam proses reintegrasi aktor dan jaringan JI di Kota Palu. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan penuh negosiasi antara aktor (Bowen, 2009). Studi kasus dipandang paling sesuai mengingat fokus penelitian diarahkan pada satu lokasi spesifik—Kompleks Masjid Husnayain dan wilayah sekitar Kelurahan Silae—yang merupakan pusat aktivitas sosial dan keagamaan jaringan JI. Desain ini memungkinkan peneliti menelusuri konteks historis, perubahan struktur internal organisasi JI, serta interaksi sosial yang terjadi dalam proses reintegrasi. Sebagai kerangka teorinya, penelitian ini menggunakan *Actor–Network Theory* (ANT) yang memandang reintegrasi sebagai proses pembentukan jaringan melalui translasi, enrolment, dan negosiasi peran antar aktor. Pendekatan ini memperkuat kemampuan desain penelitian untuk memahami hubungan antara individu, institusi, kebijakan, dan artefak material secara komprehensif.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beragam aktor, termasuk mantan anggota JI, keluarga mantan anggota JI, tokoh agama, perangkat kelurahan, RT/RW, aparat keamanan (BNPT dan Densus 88), serta warga sekitar yang memiliki interaksi rutin dengan komunitas tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mempertahankan fokus pada tema reintegrasi, sekaligus memberi ruang bagi narasi personal dan dinamika sosial yang muncul secara alami. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas masjid, kegiatan sosial, interaksi ekonomi, serta penggunaan fasilitas bersama menjadi sumber data penting untuk memahami fungsi ruang dan artefak material dalam jaringan reintegrasi. Data sekunder mencakup dokumen organisasi, laporan pemerintah, berita daring, literatur akademik, manuskrip keagamaan internal JI, serta arsip kebijakan deradikalisasi. Kehadiran data visual seperti foto kegiatan, denah area, dan catatan dokumentasi lapangan memperkaya pemahaman terhadap konteks fisik dan sosial dari fenomena yang diteliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk menangkap dinamika interaksi antaraktor, penggunaan fasilitas sosial,

serta pola kegiatan keagamaan dan ekonomi yang menjadi bagian dari proses reintegrasi. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat topik-topik seperti pengalaman reintegrasi, hubungan dengan masyarakat, perubahan ideologis, serta peran infrastruktur dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini memberikan fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan perspektif mereka secara lebih luas (Kvale & Brinkmann, 2015). Selain itu, peneliti menyelenggarakan dialog informal dan diskusi terfokus (FGD) dengan tokoh lokal dan aparat terkait untuk memperoleh perspektif institusional dan kolektif. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan BNPT, arsip organisasi JI, berita online, dan dokumen teknis pemerintah daerah yang berhubungan dengan program pemberdayaan dan pemantauan mantan teroris (BNPT, 2023).

Analisis data dilakukan melalui kombinasi analisis tematik dan analisis jaringan berbasis pendekatan ANT. Tahap pertama dimulai dengan transkripsi seluruh wawancara dan catatan observasi, kemudian dilanjutkan dengan proses coding terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema utama mengenai reintegrasi, relasi sosial, penggunaan ruang, dan peran artefak material. Selanjutnya, peneliti melakukan coding aksial untuk menghubungkan kategori tematik dengan dinamika jaringan yang terbentuk, seperti hubungan antara aktor negara, eks-JI, masyarakat, dan objek-objek teknis. Dalam kerangka ANT, analisis dilakukan melalui empat tahap utama: *problematisation*, *interessement*, *enrolment*, dan *mobilisation*, yang digunakan untuk memahami bagaimana aktor membangun, menegosiasikan, dan mempertahankan jaringan sosial. Tahap akhir melibatkan interpretasi mendalam untuk menghasilkan narasi analitis yang menggambarkan struktur jaringan, hambatan, serta pola translasi nilai moderasi dan interaksi sosial dalam proses reintegrasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam reintegrasi, perubahan ideologi merupakan salah satu indikator paling menonjol, begitu juga dengan reintegrasi eks-JI di Kota Palu. Berdasarkan wawancara seorang mantan anggota JI menyatakan bahwa: *“Kami sudah tidak mengajarkan kembali jihad bersenjata. Itu keputusan organisasi sejak pimpinan menyatakan pembubaran JI”*. Pernyataan ini konsisten dengan dokumen resmi pembubaran JI tahun 2024 yang menegaskan diakhirinya struktur *tanzim askari* dan *tanzim siri* sebagai sayap militer dan intelijen. Aktivitas keagamaan di Masjid Husnayain juga memperlihatkan perubahan praktik, misalnya penggunaan bacaan basmalah secara *jahr*

sebagai bentuk penyesuaian terhadap praktik masyarakat umum. Seperti dalam tabel 1 berikut yang menggambarkan bentuk perubahan doktrin.

Tabel 1. Perubahan Paradigma

Indikator	Sebelum 2024	Sesudah 2024
Jihad	Tafsir ofensif	Tafsir defensif-spiritual
Hubungan negara	Permusuhan	Kooperatif
Dakwah	Eksklusif	Inklusif-komunal

Data transformasi yang bersifat kolektif dan terstruktur pada level doktrin dan praktik keagamaan.

Namun perubahan ideologi tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi berlangsung secara kolektif melalui mekanisme internal organisasi. Hal ini selaras dengan temuan Fealy & White (2008) yang menyatakan bahwa perubahan elite dalam struktur JI mendorong reinterpretasi ajaran organisasi secara sistematis (Fealy & White, 2008). Dari gambaran di lapangan didapatkan tiga pola utama: *pertama*, adanya translasi makna jihad dari praksis kekerasan ke praksis spiritual. Ini dibuktikan dengan tema khutbah, isi ceramah maupun topik kajian yang dilaksanakan di Masjid Husnayain, tidak lagi melulu soal jihad, atau menyoroti peran *umara* dan kritik atas kebijakan negara terutama yang berkaitan dengan implementasi syariat. *Kedua*, meningkatnya keterbukaan terhadap aparat negara melalui kolaborasi informasi dan stabilisasi sosial. JI baik secara organisatoris maupun secara pribadi oleh beberapa anggotanya sangat terbuka mengenai informasi keamanan terutama data-data mengenai anggota JI yang masih DPO baik di dalam negeri maupun di luar negeri kepada aparat keamanan. Juga tidak ditemukan arahan atau maklumat politik kepada semua anggota JI dalam hal dukungan dan pilihan politik. Ini terlihat dari beragamnya pilihan partai dan wakil legislatif maupun pilihan kandidat presiden yang dipilih oleh setiap warga pada PEMILU 2024. Kolaborasi juga terlihat dalam beberapa kegiatan bersama seperti kegiatan pengajian, maupun kerjasama BUMN dalam sosialisasi bantuan pemasangan instalasi listrik rumah tangga gratis bagi warga. *Ketiga*, munculnya keselarasan baru antara praktik ibadah eks-JI dengan masyarakat sekitar, mencerminkan adaptasi keagamaan yang lebih moderat. Qunut nazilah dalam setiap shalat

jamaah di masjid Husnayain tidak lagi dipraktekkan, dan program jumat berkah yang setiap minggu diramalkan oleh setiap warga baik eks JI maupun warga sekitar. Ketiga pola ini memperlihatkan bahwa perubahan ideologi eks-JI tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan kondisi struktural seperti tekanan penegakan hukum, reorganisasi internal, serta kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi sosial (Horgan, 2009). Pola ini menjadi fondasi awal bagi penguatan proses reintegrasi sosial di Kota Palu.

Dari sudut pandang ANT menunjukkan perubahan ideologi eks-JI merupakan hasil interaksi antara aktor manusia dan non-manusia. Dokumen pembubaran JI, regulasi anti-terorisme, masjid, dan ruang-ruang keagamaan bertindak sebagai *aktant* yang memediasi perubahan identitas dan praktik ibadah. Proses translasi terjadi ketika eks-JI menegosiasikan ulang peran mereka sebagai warga negara yang menerima otoritas negara dan nilai-nilai moderasi, menggantikan afiliasi ideologis lama yang menolak struktur negara. Dengan demikian, perubahan perilaku yang tampak bukan sekadar akibat transformasi psikologis individual, tetapi merupakan hasil mobilisasi jaringan aktor yang memaksa terciptanya identitas baru (Braun & Clarke, 2006). Interpretasi ini memperkuat temuan Neumann (2013) bahwa deradikalisasi efektif ketika perubahan internal dipadukan dengan tekanan eksternal berupa kebijakan dan struktur sosial (Neumann, 2013). Dalam konteks Palu, perubahan ideologi terbentuk melalui simbiosis antara regulasi, komunitas lokal, dan adaptasi internal jaringan eks-JI.

Dinamika Sosial dan Interaksi Komunitas

Interaksi sosial antara eks-JI dan masyarakat Kelurahan Silae menunjukkan perkembangan positif yang signifikan. Kegiatan “Jumat Berkah”—program pembagian makanan gratis yang dilaksanakan rutin di Masjid Husnayain—menunjukkan keterlibatan warga non-JI dalam proses memasak, mendistribusikan, dan berbagi makanan. Seorang warga lokal menuturkan: “Kami sekarang biasa berkumpul dan bekerja sama, tidak ada lagi rasa canggung seperti dulu”. Terlihat juga siswa-siswi santri TPQ dari luar komunitas JI mulai mengikuti kegiatan TPA/TPQ di masjid tersebut, menandakan keterbukaan sosial yang meningkat. Beberapa orang tua santri mengakui bahwa: “lebih penting anak kami bisa baca qur’an daripada bergaul dan bermain sembarangan di luar”. Keberadaan sumber air dari jaringan pipa swadaya masyarakat dan sumur bor panel surya yang merupakan bantuan dari Dinas PU, turut mendorong interaksi karena fasilitas air digunakan bersama oleh warga Silae dan Kalora.

Tabel 2. Peningkatan Integrasi Sosial

Jenis Interaksi	2020-2021	2024
Kegiatan sosial bersama	Rendah	Tinggi
Komunikasi warga	Terbatas	Intens
Kegiatan anak-anak	Minim	Stabil

Data ini memperlihatkan integrasi sosial yang semakin kuat.

Terjadinya peningkatan interaksi sosial bukan hanya efek dari keterlibatan warga, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku eks-JI yang semakin terbuka. Ini menunjukkan bagaimana kegiatan sosial bersama berfungsi sebagai ruang negosiasi identitas baru, di mana eks-JI dan masyarakat saling mengurangi prasangka. Selain itu fasilitas material seperti sumber air, ruang masjid, dan kegiatan pendidikan menjadi titik temu yang mempertemukan dua kelompok. Sedangkan pemerintah dan BUMN bersama-sama dalam program pemberdayaan ekonomi memperluas jangkauan hubungan sosial. Beberapa warga menerima beragam bantuan pemberdayaan ekonomi, seperti pendampingan dan penyertaan modal ternak lele, bantuan mesin pencacah pakan ternak hingga pengurusan kartu jaminan kesehatan (BPJS) yang sebelumnya tidak pernah mereka akses. Temuan ini selaras dengan penelitian Cherney yang menekankan pentingnya dukungan komunitas untuk menciptakan reintegrasi yang stabil (Cherney, 2020). Data dari Palu menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk berinteraksi setara dengan eks-JI, proses penerimaan sosial berkembang lebih cepat dan memiliki fondasi yang lebih kuat.

Dinamika interaksi sosial di Palu menunjukkan bahwa hubungan antara eks-JI dan masyarakat terbentuk melalui jaringan heterogen yang melibatkan aktor eks-JI, warga, tokoh agama, aparat dan aktor non-manusia seperti air bersih, masjid, kegiatan sosial, infrastruktur. Objek material seperti fasilitas air bersih bertindak sebagai mediator yang menciptakan ruang percakapan dan kolaborasi. Masjid berfungsi sebagai *black box* yang menstabilkan ritual sosial, memperkecil jarak identitas keagamaan antara dua kelompok. Proses *interessement* tampak ketika eks-JI membuka diri terhadap kegiatan bersama, menarik warga untuk masuk ke jaringan sosial baru. Hal ini mengonfirmasi pandangan Law bahwa stabilitas hubungan dibentuk bukan oleh satu aktor dominan, tetapi oleh keseluruhan jaringan yang saling menopang (Law, 1992).

Dengan demikian, interaksi sosial yang berhasil di Palu menunjukkan bahwa reintegrasi bukan hanya fenomena psikologis atau kebijakan negara, tetapi merupakan hasil performatif jaringan sosial-material yang diciptakan dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh aktor.

Peran Kebijakan dan Infrastruktur Material

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan negara dan infrastruktur material memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses reintegrasi eks-JI. Wawancara dengan seorang pejabat kelurahan menunjukkan bahwa BNPT secara rutin melakukan asesmen dan monitoring sejak 2021: *“Pendampingan dilakukan berkala, bukan hanya pengawasan, tetapi juga pelatihan ekonomi”* (BNPT, 2025). Program bantuan produktif dari pemerintah daerah, termasuk dukungan usaha mikro dan pelatihan peternakan, terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi eks-JI. Selain itu keberadaan hunian sementara pasca gempa 2018—yang kini juga ditempati oleh warga non JI— telah menjadi ruang interaksi baru antara warga lama dan warga baru. Terlihat warga hunian juga mendapatkan bantuan pemasangan listrik 450 KWH gratis untuk 8 kepala keluarga, berkat kerja sama takmir masjid, BNPT dan Perusahaan Listrik Negara.

Tabel 3. Dukungan pemerintah

Kebijakan	Implementasi	Dampak
Monitoring BNPT	Rutin	Stabilitas sosial
Pelatihan ekonomi	2021–2024	Kemandirian
Infrastruktur air	Berfungsi	Interaksi sosial

Data ini menunjukkan adanya kontribusi nyata kebijakan dalam membentuk jaringan reintegrasi.

Hal di atas mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai katalis integrasi sosial. Kebijakan monitoring pemerintah menciptakan stabilitas sosial melalui mekanisme komunikasi dan evaluasi yang rutin berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan bibit ternak lele, bantuan alat sekolah untuk anak-anak TPQ dan pelibatan warga eks JI dalam pelatihan kewirausahaan dan pendampingan sertifikasi halal. Semua ini meningkatkan perasaan mampu dan bermakna di tengah masyarakat. Ini konsisten dengan temuan Zahari et al. bahwa reintegrasi ekonomi menekan risiko keterlibatan ulang. Sedangkan infrastruktur fisik seperti hunian sementara dan fasilitas air

menjadi ruang sosial yang membentuk interaksi sehari-hari (Zahari et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa reintegrasi tidak bisa dikonstruksi hanya melalui pendekatan ideologis, tetapi membutuhkan dukungan struktural yang berkelanjutan. Dalam konteks Palu, sinergi antara kebijakan negara, fasilitas material, dan jaringan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan reintegrasi.

Semua ini mengungkap bahwa kebijakan dan infrastruktur material bekerja sebagai aktor yang memiliki kapasitas agensi dalam jaringan reintegrasi. Kebijakan BNPT bertindak sebagai *inscription device* yang mengarahkan perilaku eks-JI, sekaligus menetapkan ekspektasi bahwa mereka harus berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga negara. Infrastruktur seperti hunian sementara dan sumur bor menciptakan ruang fisik yang memungkinkan praktik sosial baru terbentuk, memperkuat stabilitas jaringan yang sedang dibangun. Sementara proses *mobilisation* muncul ketika aktor-aktor ini—baik manusia maupun non-manusia—bekerja secara selaras menciptakan jaringan yang tahan terhadap gangguan eksternal, seperti stigma atau kriminalitas. Temuan ini mengonfirmasi pandangan Latour bahwa jaringan sosial terbentuk melalui koordinasi elemen material dan simbolik yang saling berkelindan (Latour, 2005). Dalam kasus Palu, reintegrasi berhasil karena jaringan aktor yang terbentuk memiliki kapasitas adaptasi dan dukungan material-institusional yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa reintegrasi tidak hanya merupakan proses psikologis, tetapi juga sosial, material, dan institusional. Temuan ini sejalan dengan deskripsi proses reintegrasi dalam dokumen lapangan yang menunjukkan bahwa setiap aktor berperan dalam membentuk dinamika interaksi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi membutuhkan sinergi antara perubahan individu, penerimaan sosial, dan dukungan kebijakan. Hubungan antara perubahan ideologi, interaksi sosial, dan dukungan kebijakan tampak saling memperkuat dalam menciptakan reintegrasi yang stabil. Perubahan ideologis menyediakan landasan kognitif bagi eks-JI untuk meninggalkan kekerasan, sedangkan interaksi sosial memungkinkan mereka membangun identitas baru dalam komunitas. Temuan ini menjawab pertanyaan "mengapa" reintegrasi dapat berlangsung relatif damai di Palu: karena perubahan perilaku eks-JI diperkuat oleh konteks sosial yang menerima dan kebijakan yang memfasilitasi. Hal ini sejalan dengan argumen Horgan (2009) bahwa *disengagement* yang berhasil membutuhkan kombinasi perubahan internal dan dukungan eksternal (Horgan, 2009).

Selain itu, berbagai objek material seperti masjid, air bersih, dan hunian sementara bertindak sebagai mediator yang memungkinkan terjadinya proses translasi antar aktor dalam kerangka ANT (Latour, 2005). Dengan demikian, hubungan antarvariabel tidak bersifat linier, tetapi bersifat ekosistemik, di mana perubahan satu komponen memperkuat komponen lainnya. Hasil ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami reintegrasi kelompok keagamaan yang pernah terlibat radikalisme.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan studi terdahulu. Persamaannya terlihat dalam temuan Cherney yang menunjukkan bahwa dukungan komunitas merupakan faktor penting dalam reintegrasi (Cherney, 2020). Di Palu, kegiatan sosial dan fasilitas bersama terbukti menciptakan ruang interaksi yang memperkuat penerimaan sosial. Selain itu, penelitian ini mendukung temuan Zahari et al. bahwa pemberdayaan ekonomi adalah faktor kritis dalam mencegah re-radikalisasi (Zahari et al., 2024). Namun, penelitian ini berbeda dari pendekatan psikologis individual seperti yang dikemukakan Bartlett & Miller (2012), karena memperlihatkan bahwa perubahan perilaku eks-JI tidak dapat dijelaskan hanya melalui transformasi kognitif (Bartlett & Miller, 2012). Unsur kebaruan penelitian ini adalah penggunaan ANT dalam menafsirkan reintegrasi sebagai proses jaringan yang melibatkan aktor manusia dan non-manusia. Berbeda dari studi yang menempatkan individu sebagai pusat analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa objek material air bersih, hunian, masjid, kebijakan, bantuan, pendampingan dan pemberdayaan dalam ruang geografis bersama memainkan peran aktif membentuk hasil reintegrasi.

Kesimpulan

Reintegrasi JI di Palu memiliki makna sosial, historis, dan ideologis yang signifikan. Secara sosial, reintegrasi mencerminkan keberhasilan masyarakat dalam menegosiasi ulang hubungan yang sebelumnya terbelah akibat stigma terorisme. Secara historis, perubahan ini menandai pergeseran penting dalam perjalanan JI di Indonesia: dari kelompok bersenjata menjadi komunitas religius yang lebih moderat, sejalan dengan temuan Fealy & White (2008). Secara ideologis, proses translasi nilai yang terjadi menunjukkan bahwa identitas keagamaan bersifat cair dan dapat beradaptasi dengan konteks baru ketika tekanan internal dan eksternal berpadu. Penggunaan ruang masjid dan fasilitas sosial sebagai mediator identitas menegaskan bahwa perubahan tidak hanya terjadi dalam alam pikiran, tetapi diwujudkan melalui praktik sehari-hari.

Interpretasi ini memperlihatkan bagaimana jaringan sosial-material membentuk orientasi ideologis baru, mendukung pandangan Latour bahwa transformasi sosial tidak pernah terlepas dari peran objek, ruang, dan institusi yang melingkupi aktor.

Sebagai refleksi, keberhasilan reintegrasi di Palu memiliki implikasi penting secara teoretis dan empiris. Secara teoretis, penelitian ini memperluas wacana reintegrasi dengan memperlihatkan bahwa jaringan sosial-material harus dipertimbangkan sebagai determinan utama, melampaui penjelasan berbasis psikologi atau komunitas semata. Temuan ini memperkuat model relasional seperti ANT yang menekankan bahwa perubahan sosial terjadi melalui kombinasi aktor manusia dan non-manusia. Secara empiris, penelitian ini menegaskan bahwa reintegrasi membutuhkan keberlanjutan intervensi, bukan hanya intervensi jangka pendek. Ketergantungan pada fasilitas material seperti air, hunian, dan masjid serta sekolah juga menciptakan potensi disfungsi—misalnya ketika infrastruktur rusak atau tidak terpelihara, hubungan sosial dapat terganggu. Termasuk penindakan aksi kriminalitas pencurian dan pengrusakan fasilitas publik yang penting bagi warga sekitar eks Jl. Hal tersebut dapat menjadi kendala karena itu keterlibatan aparat baik secara tegas tapi komunikatif dan persuasif perlu dipertahankan untuk mencegah munculnya kembali ketegangan yang tidak diinginkan. Reintegrasi bukan proses otomatis, tetapi memerlukan pemeliharaan jaringan secara terus-menerus.

Karena itu ada beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan reintegrasi dan pemeliharaan jaringan dalam reintegrasi di antaranya; Pertama, pemerintah perlu mempertahankan pendekatan kolaboratif antara Kepolisian, BIMAS, BNPT, lembaga lokal, dan masyarakat, mengingat keberhasilan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas hubungan sosial. Kedua, program pemberdayaan ekonomi harus diperluas dengan dukungan modal, pelatihan lanjutan, dan akses pasar agar eks-JI dapat mempertahankan kemandiriannya. Ketiga, infrastruktur komunal seperti sumber air, masjid, dan hunian sementara harus dikelola dan dipelihara sebagai ruang integratif bagi warga. Keempat, narasi keagamaan moderat perlu terus diperkuat melalui pelibatan tokoh agama lokal, mendukung temuan Pepinsky (2016) bahwa institusi keagamaan mampu meredam ketegangan ideologis. Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi berkala berbasis indikator jaringan

sosial-material untuk memastikan bahwa reintegrasi tidak hanya berlangsung secara simbolik, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dan sebagai penutup, hal yang harus disadari adalah sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini. Studi ini dilakukan pada satu lokasi, sehingga generalisasi ke wilayah lain harus dilakukan dengan hati-hati mengingat perbedaan kondisi sosial, historis, dan kultural antarwilayah. Data yang bersifat kualitatif juga bergantung pada keterbukaan informan serta interpretasi peneliti, sehingga potensi bias tetap perlu dipertimbangkan. Selain itu, penelitian ini belum mencakup pemantauan jangka panjang yang dapat melihat perubahan perilaku eks-JI secara lebih stabil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi studi, menggunakan pendekatan longitudinal, mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, serta memperdalam analisis terhadap peran keluarga, perempuan, dan teknologi digital dalam proses reintegrasi. Pendekatan evaluasi berbasis jaringan juga direkomendasikan untuk mengukur efektivitas interaksi manusia-non-manusia dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan dapat memperkaya model reintegrasi yang lebih adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Ariyanti, V., & Maula, B. S. (2020). Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 14(2), 259–282. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>
- Bartlett, J., & Miller, C. (2012). The edge of violence: Towards telling the difference between violent and non-violent radicalization. *Terrorism and Political Violence*, 24(1), 1–21.
- BNPT. (2023). *Laporan nasional penanggulangan terorisme*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- BNPT. (2025). *Evaluasi deradikalisasi dan reintegrasi Jemaah Islamiyah*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In *Power, action and belief*. Routledge.

- Cherney, A. (2020). Evaluating interventions to disengage extremist offenders: A study of the proactive integrated support model (PRISM). *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 12(1), 17–36. <https://doi.org/10.1080/19434472.2018.1495661>
- Crawford, T. H. (2020). Actor-Network Theory. In D. S. Lynch (Ed.), *Oxford Research Encyclopedia of Literature* (1st ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.965>
- Davies, T. R., & Peña, A. M. (2021). Social movements and international relations: A relational framework. *Journal of International Relations and Development*, 24(1), 51–76. <https://doi.org/10.1057/s41268-019-00180-w>
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Horgan, J. (2009). *Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements*. Routledge.
- Ike, T. J., Singh, D., Murphy, S., Jidong, D. E., Porritt, F., & Ayobi, E. E. (2022). Community perspectives of former terrorist combatants, militants and reintegration programmes in Nigeria: A systematic review. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 14(2), 142–168. <https://doi.org/10.1080/19434472.2020.1834431>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. SAGE Publications.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network theory*. Oxford University Press.
- Law, J. (1992). Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity. *Systems Practice*, 5(4), 379–393. <https://doi.org/10.1007/BF01059830>
- Mujahid, D. R. (2020). Peran Keluarga dalam Proses Disengagement Pelaku Teror di Indonesia. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.36341/psi.v4i1.1325>
- Mwangi, J., Muniu, D., & Gloceps, T. (2022). Challenges to reintegration of women foreign terrorist fighters in Kenya. *Safer Communities*, 21(3), 218–233.
- Neumann, P. R. (2013). The trouble with radicalization. *International Affairs*, 89(4), 873–893. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12049>
- Ryfe, D. (2022). Actor-Network Theory and Digital Journalism. *Digital Journalism*, 10(2), 267–283. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1945937>
- Thahir, L. S., Ihsan, M., & Hamka, H. (2018). Paradigma baru penanganan narapidana teroris di Sulawesi Tengah. *Jurnal Istiqro*, 2(1), 1–21.
- Zahari, A. I., Zakaria, N. B., Hanafiah, M. H., & Ramli, L. E. (2024). Challenges to reintegration: A case study of violent extremist detainees and their reintegration into Malaysian society. *Safer Communities*, 23(1), 1–22. <https://doi.org/10.1108/SC-09-2022-0038>